

DAFTAR PUSTAKA

- Ablessy Mumu, A. L. (2018). *Ipteks Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado*.
- Adi Susanto, F. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Provinsi Bengkulu*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>
- Direktorat Jendral Pajak. (2012). *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id>
- Ihsan, N. (2017). *Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil*.
- Izza, D. L. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.

- Kementerian Keuangan. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD*.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Informasi APBN 2021*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>
- Kementerian Pendidikan, K. R. (2021). *Data Pokok SMP Negeri 5 Kota Bekasi*. Retrieved from <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/8FE227F1405F7D14BE85>
- Kumorotomo, W. (2011). *Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai: Kasus Di Provinsi Gorontalo dan Provinsi DKI Jakarta*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. (2021). *Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi*.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2020). *Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 842/KEP.18 BKPPD/I/2020*.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2020). *Peraturan Walikota Bekasi Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi*.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2021). *Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi*.
- Pengantar Perpajakan. (2005). In S. Nurmantu.
- Republik Indonesia. (2007). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sifrid S. Pangemanan, R. A. (2015). Analisis Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Apbn Atau APBD Atas Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai pada Dikpora Kabupaten Minahasa.

Silitonga, B. N. (2021). Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Guru Tetap pada Sekolah Dasar Swasta Santo Yosef.

Smith, A. (1776). *The Wealth of Nation*.

SMPN 5 Kota Bekasi. (2021). Retrieved from <https://www.smp5bekasi.sch.id/>

Wilujeng, T. (2021). Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang.